

# **PENGUNAAN PAR MENCAIRKAN DAMAI BEKU DI DAERAH PASCA KERUSUHAN (Studi Kasus di Ternate dan Poso)**

**Rusmin Tumanggor**

## **ABSTRAK**

*Pelbagai strategi, metode dan teknik serta prosedur penelitian untuk pengembangan kehidupan masyarakat sudah ditempuh. Baik semenjak filosofi : rural rapid appraisal (RRA) hingga bergeser pada participatori rural appraisal (PRA), namun masih banyak kegagalannya. Semenjak itulah para inovator metodologi penelitian terus berkreasi. Akhirnya membuahkan konsep dan telah diujicobakan ternyata hasilnya cukup menggembirakan. Ketika kerusuhan menyulut kejiwaan sebahagian warga masyarakat (konflik) di beberapa wilayah di tanah air penanganannya dicoba juga dengan PPA dan PRA yang hasilnya menurut warga masyarakat sasaran banyak mengecewakan. Dari itulah Tim Peneliti mencoba dengan penggunaan PAR tersebut ternyata setidaknya kurang mengecewakan jikapun tidak sampai dinyatakan sangat berhasil. Langkah-langkah yang ditempuh terbaca pada narasi berikut ini.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak tiga dasawarsa pemerintahan Orde Baru arah kebijakan politik pemerintah membuat kita sebagai bangsa sungguh terampil menyelesaikan konflik, namun sama sekali tidak terlatih untuk mengelola konflik. Dua term tersebut mempunyai perbedaan yang sangat jelas. Penyelesaian konflik menunjuk pada pengertian penghentian, peredaman atau penghilangan suatu konflik. Implikasinya adalah konflik merupakan sesuatu yang negatif, yang bisa diselesaikan, diakhiri dan dihapuskan. Berbeda dengan itu, konflik bisa negatif, bisa juga positif.

Konflik adalah interaksi beberapa keinginan dan tujuan yang berbeda dan berlawanan yang di dalamnya perselisihan itu bisa diproses, akan tetapi tidak secara pasti diselesaikan dan berposisi laten. Ini adalah bagian penting dari dialog demokratis yang sehat, dengan syarat tetap berada di bawah aturan main yang demokratis yang diterima

bersama. Ekspresi kekerasan (*hardness*) dari sebuah konflik adalah sisi negatif yang harus dihindari. Pengelolaan konflik dengan demikian, merupakan "penanganan perbedaan dan divergensi yang positif dan konstruktif sehingga tersalur keinginan semua pihak secara proporsional yang demokratis bagi kehormatan hidup bersama".

Sudah saatnya pemerintah menggeser arah kebijakan kerukunan dan penanganan konflik dari yang bersifat *top down* menjadi *bottom up*, dari orientasi menyelesaikan menjadi mengelola, dari pola kebijakan instruksi menjadi partisipasi. Untuk menegajawantahkan itu semua dalam kerangka praksis perlu dilakukan sebuah ujicoba model kedamaian sosial. Dalam ujicoba ini akan diterapkan konsep-konsep pengelolaan konflik secara *bottom up* dan partisipatif dengan menyentuh langsung problem riil dan orisinil serta pemecahan oleh masyarakat yang pernah terlibat konflik dan kerusuhan. Karena merujuk kepada hasil penelitian Lemlit UIN Syarif Hidayatullah dengan Puslitbang UKS Balatbangsos Departemen Sosial RI terdahulu tahun 2003, masyarakat

menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam merancang pembangunan untuk mereka, dan itu sangat didambakan, sehingga penelitian tersebut merekomendasikan:

"Dalam pelbagai kegiatan pembangunan masyarakat hendaknya mengikutsertakan partisipasi masyarakat bukan sebagai objek tapi juga sebagai bahagian dari subjek pembangunan itu sendiri, khususnya pasca kerusuhan terutama pada desa-desa di wilayah yang pernah rusuh. Sementara di lokasi damai diperkuat ikatan kebersamaan melalui program penguatan jaringan ekonomi, sosial dan keamanan. Model pembangunan yang akan datang sebaiknya lebih banyak lewat pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) sehingga masyarakat berpengalaman dalam melakukan analisa dan evaluasi kebutuhan "*need assesment*", kemudian merancang program (*design programming*) dan melaksanakannya (*implemented*) sampai menemukan kondisi pengembangan diri "*self development*" dalam konstalasi kehidupan yang bersifat pembangunan masyarakat "*community development*" sampai pada pertumbuhan kemandirian warganya masing-masing "*self sustaining growth*".

## B. Permasalahan

1. Kajian latar dinamika konflik menelisik permasalahan penelitian

Analisa : DEKLARASI MALINO UNTUK POSO

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang mewakili masyarakat Muslim dan Kristiani Poso serta kelompok-kelompok yang bertikai dan perselisihan yang berlangsung selama tiga tahun terakhir ini di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali, telah membawa penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi rakyat, maka dengan hati yang lapang serta jiwa terbuka, sepakat:

- a. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan
- b. Mentaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar

- c. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan
- d. Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan keadaan darurat sipil, serta campur tangan pihak asing
- e. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memanfaatkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama
- f. Tanah Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Karena itu setiap warga negara memiliki 9 hak untuk hidup, datang, dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat
- g. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung
- h. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing
- i. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh
- j. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati, dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk Undang-undang, maupun peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Pernyataan kesepakatan ini dibuat dengan ikhlas dan i'tikad baik untuk menjalankannya.

Realisasi dari pernyataan ini, akan dilaksanakan dengan agenda serta rencana sebagai berikut:

- I. Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum (Lampiran I)
- II. Komisi Sosial Ekonomi (Lampiran II)

Pemantauan pelaksanaan rencana tersebut, dilakukan oleh Tim Pemantau Nasional dan Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk di daerah.

Dibuat di : Malino

Pada tanggal : 20 Desember 2001



Penelitian Pertama (Suasana Masih Tegang Pada Tahun 2002, Namun Sudah Ada Pengerahan Pasukan Lintas Wilayah dan Pusat) berupa:

- a. Penjaringan data yang berwujud judul "Konflik Dan Modal Kedamaian Sosial Dalam Konsepsi Kalangan Masyarakat Di Tanah Air: Studi Penelusuran Idea di Kawasan Komunitas Krisis Integrasi Bangsa Dalam Merambah Kebijakan"
- b. Wilayah penelusuran tersebut meliputi:
  - 1) Preliminary research : Ambon untuk kumpul data awal dan uji coba pedoman peliputan data
  - 2) Penelitian Penjaringan Data Lengkap: Sambas, Sampit, Ambon, Poso dan Ternate.
  - 3) Tabulasi, Analisa, Interpretasi, dan Analisa Teoritis, dan penuangan dalam tulisan
  - 4) Diskusi, Seminar, Perbaikan Data ke Lapangan Setting Penelitian, dan Finalisasi
  - 5) Edit dan Penerbitan
- c. Mitra Kerja: Depsos (Pengajuan Proposal); Menkokesra; Pemda Setempat; Pihak Keamanan;
- d. Informan dan responden: Pelapisan masyarakat
- e. Seusai itu dilanjutkan dengan penelitian tahap II "Model Kedamaian Sosial di Wilayah Konflik". Disul untuk di 5 wilayah, dan yang disetujui dibiayai pada dua wilayah dan Tim memilih "Ternate dan Poso" yang lebih membutuhkan, memperhatikan ambon sudah lebih terkendali dan intensifnya pihak keamanan dan tokoh-tokoh agama. Sementara Sambas dan Sampit, warga masyarakat Maduranya belum berada di tempat setelah eksodus ke Madura dalam waktu yang tidak dapat ditentukan waktu itu. Sementara Poso masih sering dilanda penembak dan penculik sistemik. Sedangkan di Jailolo komunikasi antar warga dan lintas desa mayoritas agama masih penuh kecurigaan dan menegangkan.

2. Menarik garis merah tentang permasalahan

Banyak penelitian telah dilakukan yang memberi rekomendasi untuk perbaikan, namun tidak dilanjutkan dengan implementasi (*participatory action research*). Sebaliknya banyak program-program yang dilaksanakan ke masyarakat tidak didasarkan kepada *need assessment*. Padahal berdasarkan hasil penelitian terdahulu, sebagian besar masyarakat menginginkan agar penanganan konflik lebih banyak melibatkan mereka dengan terlebih dahulu dilakukan inventarisasi kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaan penelitiannya adalah; 1) Bagaimana penilaian masyarakat terhadap penanganan konflik yang selama ini telah dilakukan? 2) Bagaimana model penanganan konflik (masa de-eskalasi) yang ideal menurut masyarakat? 3) Apa saja program-program yang ingin dilakukan masyarakat berdasarkan penjaringan *need assessment*?

### C. Hipotesis

*"Tingkat keterlibatan masyarakat di dalam mengelola dan menangani konflik yang terjadi berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian konflik secara damai dan berkesinambungan".*

### D. Tujuan dan Signifikansi

Secara umum program ini bertujuan membangun situasi kondusif bagi pembentukan kedamaian sosial di Indonesia baik pada tingkat wacana maupun praktisnya, terutama di kalangan menengah bawah. Strata ini merupakan *ladang potensial* untuk digarap dalam rangka menciptakan integritas masyarakat yang kuat dan masyarakat yang damai. Dari sudut akademis dapat ditemukan paradigma, konsep, proposisi serta model teoritis tentang hasil pelaksanaan penelitian dengan pendekatan PAR di daerah yang pernah terlibat kerusuhan.

Secara khusus penelitian ini bertujuan: 1) Mendapatkan penilaian masyarakat terhadap penanganan konflik yang telah dilakukan selama ini, 2) Memperoleh model penanganan konflik ideal yang diharapkan oleh masyarakat, 3) Mendapatkan masukan-masukan program yang diharapkan oleh masyarakat dalam

proses Need Assessment hubungannya dengan upaya damai.

Dari aspek signifikansi, penelitian ini berguna bagi pengambil kebijakan bidang model penelitian dan pembangunan dalam merespon pembangunan pada masyarakat rawan konflik berbasis desa atau kelurahan. Juga sangat baik bagi kajian akademis dari temuan yang diperoleh sehingga melahirkan model teoritis tentang masyarakat konflik, rusuh dan pembangunan desa dan kelurahan kearah kedamaian.

#### E. Kajian Teori dan Kerangka Konseptual

Secara harfiah, PRA "*Participatory Rural Appraisal*" adalah teknik penilaian untuk mengkaji kondisi masyarakat. Pada beberapa tempat dan kasus, sering juga disebut PLA (*Participation Learning and Action*). Pendekatan PRA dilakukan lebih pada proses yang dikaji sehingga lebih pada pengamatan kondisi (sosial, ekonomi, budaya) sehingga mendatangkan sebuah informasi. Dalam melakukan PRA ada beberapa teknik yang biasa dipakai sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan informasi yang diperlukan, diantaranya: 1) penelusuran sejarah, 2) bagan kecenderungan dan perubahan, 3) kalender musim, 4) jadwal sehari, 5) peta desa, 6) transek, 7) peta kebun, 8) diagram venn, 9) bagan alur, 10) kajian mata pencaharian, 11) matrix ranking, 12) wawancara terstruktur.

Selama ini program pengembangan dan penanganan masalah kemasyarakatan terutama yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan asumsi bahwa ada sejumlah konstruksi narasi besar yang ditransformasikan ke dalam masyarakat. Program penanganan masalah kemasyarakatan telah *disetting* melalui juklak dan juknis, dari mulai tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan. Aparatur pemerintah maupun penggiat masyarakat harus menjalankan program itu tanpa berusaha untuk melakukan improvisasi, inovasi dan inisiasi termasuk memperhatikan potensi-potensi sosial, ekonomi dan budaya dari gagasan (*idea*) masyarakat setempat. Padahal sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tidaklah mungkin

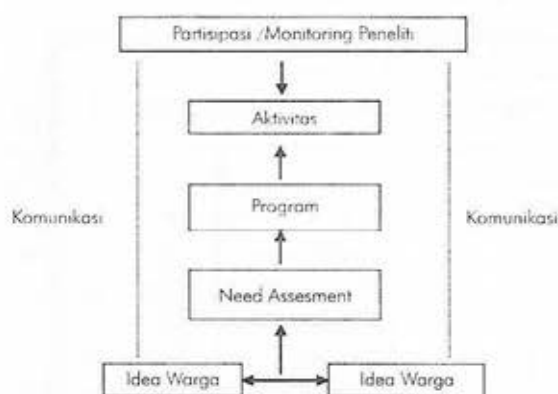
seragam dan sangat kompleks. Implikasi dari pendekatan semacam ini adalah makin lemahnya partisipasi masyarakat. Sehingga hal itu menyebabkan kurangnya motivasi dan daya dorong masyarakat untuk ikut terlibat dalam melakukan prakarsa, perencanaan, memberikan usul, merumuskan dan mengevaluasi serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik pada berbagai levelnya, baik pusat maupun daerah senada dengan ruh otonomi daerah.

Dalam konteks inilah pengorganisasian masyarakat atau *community organizing* menjadi pilihan pendekatan untuk penanganan masalah konflik dan penguatan masyarakat sebagai modal utama (*social capital*) yang substansil. Pemeran utamanya (*The leading role player*) adalah masyarakat sendiri, sedangkan *community organizer* semata berperan sebagai fasilitator dan katalisator yang menggali dan mengembangkan potensi sosialnya sehingga menjadi masyarakat yang kuat dan saling menerima hingga menyatu (*forceful and integrative community*), yang dengan itu tidak akan mudah untuk terpancing kembali menyelesaikan permasalahan yang muncul atau terprovokasi melalui konflik fisik. Peran *community organizer* sebagai katalisator ini sedianya telah mempercepat gerak perubahan, dan merangsang tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk menentukan langkahnya sendiri (*self-determination*) dan kemampuan untuk menolong dirinya sendiri (*self-help*). Pada perkembangan berikutnya, masyarakat diharapkan mampu *self-regulating*.

Dari urian di atas ini dapat dikembangkan kerangka konseptual dari teori pendekatan PAR tersebut sbb:



Bagan Skema Kerangka Konseptual Penelitian PAR



Jika dinarasikan kerangka konseptual di atas sebagai model teoritis yang di angkat dari uraian para ahli maupun pengalaman di lapangan adalah sbb "Semakin mengakar program dari ide, aktivitas sosial dan perilaku bersama internal atau dan lintas masyarakat dalam membangun atau melakukan perubahan dan direspon secara partisipatif oleh peneliti, akan semakin mempercepat kemajuan dalam pelbagai komponen kehidupan hingga penguatan serta penambahan komponen pranata atau kelembagaan dalam masyarakat yang bersangkutan" atau "The Community Sharing Ideas Theory"

## F. Metode Penelitian Yang Digunakan

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Poso dan Ternate. Di Poso setting penelitian dipusatkan di Kecamatan Poso Kota, Desa Tegal Rejo yang penduduknya mayoritas Muslim dan Desa Madale yang penduduknya mayoritas kristen. Di Ternate di pusatkan di Kecamatan Jailolo di Desa Swakonora yang penduduknya mayoritas Muslim dan Desa Acango yang penduduknya mayoritas Kristen.

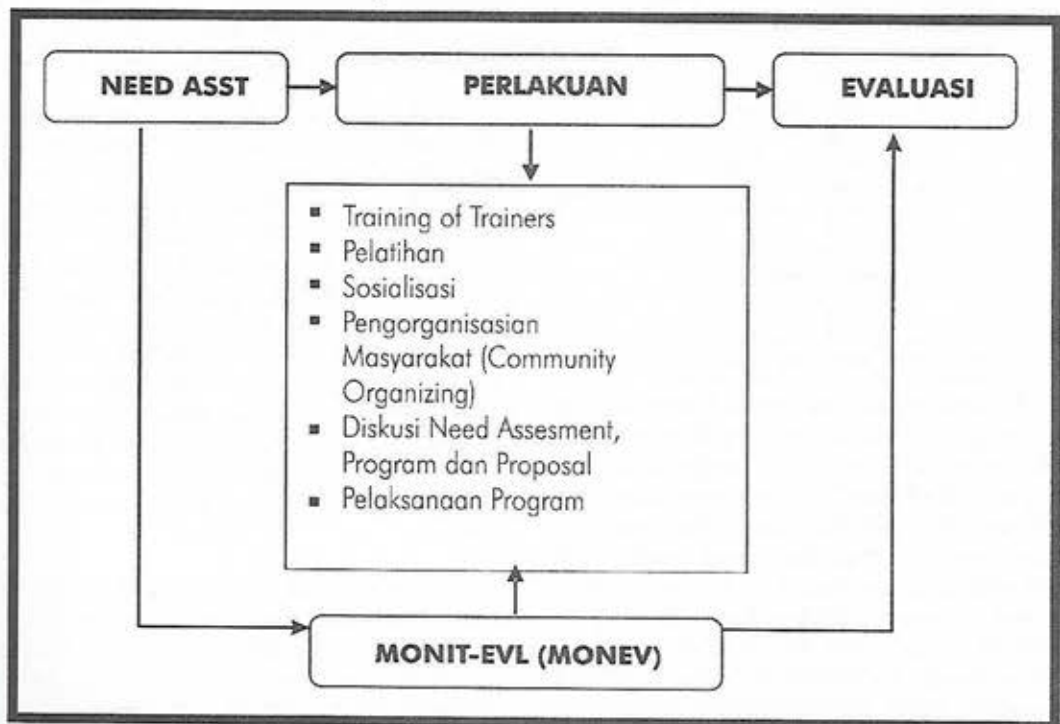
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian partisipasi (*participatory action research*). Dalam konteks ini, informan sasaran dipandang sebagai subjek dan objek perlakuan. Artinya informan terlibat langsung dalam setiap tahapan proses pelaksanaan program atau sebagai pelaku perubahan, sedangkan peran peneliti lebih sebagai fasilitator dan partisipan yang membantu masyarakat menganalisa dan menemukan permasalahan yang mereka hadapi. Di sisi lain

sasaran informan dipandang sebagai subjek penelitian, artinya keterlibatan mereka dalam proses riset aksi secara keseluruhan merupakan suatu fenomena yang diamati oleh peneliti.

Untuk memudahkan pengukuran keberhasilan program, maka ditetapkan pola pengukuran dengan menggunakan pre dan post test terhadap kelompok sasaran program. Pre-test dilakukan untuk memperoleh data dan informasi kondisi awal masyarakat desa/ kelurahan yang meliputi aspek partisipasi, sikap dan motivasi mereka dalam turut serta menciptakan kedamaian sosial di wilayahnya sebelum diberi perlakuan. Sedangkan post test dimaksudkan untuk mendeskripsikan kondisi masyarakat, yang meliputi aspek partisipasi, motivasi dan sikapnya dalam turut serta menciptakan kedamaian sosial setelah diberi perlakuan.

Adapun tehnik yang digunakan untuk itu adalah mendorong warga masyarakat diskusi menentukan *need assesment* mereka, program yang dirasa mereka perlu untuk memperoleh kebutuhan kedamaian mereka, cara membuat proposal bagi perolehan dana dari pihak lain. Untuk melihat runut skema program lihat bagan berikut :

### Bagan Skema Alur Penelitian:



## II. DESKRIPSI SETTING OBYEK PENELITIAN

### A. Poso

#### 1. Kelurahan Tegalrejo

Luas Kelurahan Tegalrejo yang merupakan salah satu bagian dari kecamatan Poso Kota kurang lebih 21.615 Ha, dengan batas-batas wilayah: sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Madale; Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Lawanga; Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Bukit Bambu dan sebelah Utara berbatasan dengan laut/pantai teluk Tomimi.

Jarak dari kelurahan Tegalrejo ke kota Poso kurang lebih 4 km dan dapat ditempuh dengan jalan darat baik dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jumlah penduduk kelurahan Tegalrejo pada tahun 2004 sebanyak 1826 jiwa terdiri 998 orang laki-laki dan 828 orang perempuan, dengan jumlah KK 437. Mayoritas penduduk kelurahan Tegalrejo beragama Islam (100%), sedangkan suku yang ada di

kelurahan Tegalrejo antara lain Suku Jawa, Suku Pamona, Suku Bugis, Suku Gorontalo dan Suku Kaili. Suku yang paling banyak di kelurahan Tegalrejo adalah suku Jawa sebagai warga pendatang dan suku Pamona sebagai warga asli Poso.

Rata-rata penduduk masyarakat kelurahan Tegalrejo adalah bertani ladang namun ada sebagian nelayan, buruh bangunan, sopir, ojek, berjualan di pasar dan ada beberapa orang yang pengusaha kecil (bangunan dan perabot rumah tangga), ditambah lagi dengan beberapa orang yang pegawai negeri sipil dan guru. Penghasilan masyarakat kelurahan Tegalrejo rata-rata berkisar kurang lebih Rp.10.000/hari atau kurang lebih Rp.300.000/bulan. Fasilitas yang ada di kelurahan Tegalrejo antara lain: Rumah ibadah (masjid) 2 buah dan 1 buah musholla, sekolah : SDN XXIV 1 buah, MTS Alkhairat 1 buah TK Alkhairat : 1 buah, panti Asuhan : 2 buah (PA. Fadillah dan PA Nurul Ikhshan). Jalan raya yang ada di kelurahan Tegalrejo adalah jalan raya yang dapat di lewati oleh mobil angkutan kota, sedangkan



jalan raya yang ada di sebelah utara yaitu yang berada di pantai teluk tomimi merupakan jalan raya yang menghubungkan kota Poso dengan Ampana dan Luwuk

## **2. Kelurahan Madale**

Kelurahan Madale terletak 0° permukaan laut/teluk yang dikenal dengan teluk Tomini. Adapun luas wilayah kelurahan Madale sekitar 5.000 M<sup>2</sup>. Batas yang mengelilingi wilayah Madale sebagai berikut: sebelah Utara dengan teluk Tomini; sebelah Selatan dengan Kel. Tegalrejo; sebelah Timur dengan Desa Labuan dan sebelah Barat dengan Teluk Tomini. Jarak yang harus ditempuh bagi warga yang akan bepergian ke kota Kecamatan dari wilayah Madale untuk menuju ke kota kecamatan yaitu sejauh 5 KM.

Jumlah penduduk pada tahun 2004 ini sebanyak 153 KK yang terdiri dari 375 laki-laki dan sebanyak 390 perempuan, namun hingga saat ini belum semua penduduk kembali ke wilayah Madale karena masih mengungsi di wilayah Tentena. Mayoritas penduduk menganut agama Kristen sementara ada satu dusun yang memeluk agama Islam, dan merupakan komunitas nelayan pendatang, jumlah pendatang ini sangat sedikit. Suku-suku bangsa yang mendiami wilayah ini berasal dari suku: Pamona, Mori, Kaili, Buton, Bajo, dan Bugis. Sebagai suku mayoritas adalah suku Pamona yang merupakan suku asli di Poso. Pada umumnya masyarakat Madale memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani yang hampir seluruhnya mempunyai kebun yang cukup luas. Sebagian warga ada yang bekerja sebagai nelayan, Pegawai negeri Sipil dan sektor swasta. Jika dirata-ratakan secara umum maka perkiraan penghasilan per bulan masyarakat Kelurahan Madale berkisar Rp. 575.000.

Fasilitas yang ada saat ini di kelurahan Madale terdiri dari 2 buah Gereja (satu sedang di bangun) 1 buah Masjid serta 1 buah Pure. Selain itu terdapat 1 buah sarana puskesmas bagi warga. Akses jalan raya ke wilayah Kelurahan ini cukup lancar dan baik serta dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 sehingga dapat digunakan untuk menuju ke wilayah Poso Kota dan wilayah lain. Hasil pengamatan di

lapangan menunjukkan sarana air bersih untuk keperluan sehari-hari belum memadai.

## **B. Ternate (Halmahera Barat)**

### **1. Kelurahan Soakonora**

Desa Soakonora, secara geografis dan demografis termasuk wilayah yang paling luas. Karena itu, bila dilihat dari sisi jumlah penduduknya, desa ini termasuk desa paling banyak penduduknya bila dibandingkan dengan desa lain di kecamatan Jailolo. Menurut kepala desanya Hamim Damsunge, jumlah keseluruhan penduduk desa ini adalah 1.942 orang terdiri atas, 1.072 laki-laki, 870 perempuan, dan 506 kepala keluarga. Pada saat terjadi kerusakan tahun 1999, umumnya penduduk desa ini mengungsi, bahkan yang tidak mengungsi hanya 35 % nya saja. Ketika diadakan penelitian tahun 2003, masih banyak penduduk desa ini yang belum kembali dari tempat pengungsian. Akan tetapi pada saat peneliti datang tahun 2004, mayoritas penduduk ini sudah kembali menempati rumah-rumah yang mereka bangun kembali meskipun sangat sederhana. Dari catatan yang ada di kepala desa, hanya sekitar 4 kepala keluarga saja yang belum kembali, itu pun mereka yang mengungsi di luar propinsi Maluku Utara. Sedangkan mata pencaharian penduduk desa ini mayoritas adalah petani dan buruh kebun.

### **2. Kelurahan Acango**

Berbeda dengan Desa Soakonora, Acango adalah termasuk desa yang paling sempit wilayahnya, karena itu, jumlah penduduknya pun paling sedikit. Dari hasil pengamatan dan juga wawancara dengan kepala desa dan beberapa orang penduduknya, jumlah secara keseluruhan penduduk desa ini adalah hanya 315 orang yang terdiri atas 189 laki-laki, 126 perempuan dan 86 kepala keluarga. Namun, akibat kerusakan, jumlah yang ada tersisa hanya 84 kepala keluarga dengan penduduk sekitar 310 orang. Keseluruhan penduduk desa ini, pada saat dilakukan penelitian tahun 2003 masih menempati barak pengungsian yang dibangun oleh pemerintah. Akan tetapi, pada tahun 2004, hanya tinggal 5 kepala keluarga atau sekitar 18 orang yang masih menempati di barak

pengungsian, umumnya sudah membangun rumah meskipun sangat sederhana dan berasal dari kayu.

Meskipun secara geografis dekat dengan laut, akan tetapi penduduk baik dari Desa Soakonora maupun Acango, sedikit sekali yang berprofesi sebagai pelaut/nelayan. Umumnya mereka hanya menjadi buruh kebun dan juga tukang bangunan. Kondisi ini juga seperti halnya umumnya masyarakat Halmahera Barat bahkan umumnya penduduk Maluku Utara seperti dijelaskan di atas.

Mengenai kondisi demografis kecamatan Jailolo, secara keseluruhan penduduknya berjumlah 41.741 jiwa, yang terdiri atas; Laki-laki 21.242 dan perempuan 20.499 jiwa, sebagai berikut:

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Jailolo

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Laki -laki	21.242	50,9
2.	Perempuan	20.499	49,1
	Jumlah	41.741	100

Sumber: Data Monografi Kec. Jailolo Tahun 2003

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk kecamatan Jailolo termasuk paling banyak bila dibandingkan dengan penduduk kecamatan lain di kabupaten Maluku Utara. Jumlah penduduk kecamatan Jailolo tersebut, tersebar di 47 desa. Bila dibandingkan dengan luas wilayahnya, yakni 101.250 Ha, atau 1.012 Km<sup>2</sup> dihuni oleh 41.741 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata kecamatan adalah 41 jiwa per Km<sup>2</sup>.

### III. TEMUAN PENELITIAN

#### A. Kapasitas Pengetahuan Masyarakat Menganalisis Masalah Konflik dan Damai (*intellectual quality*)

Penilaian terhadap kapasitas pengetahuan masyarakat dalam menganalisis masalah konflik sebagai upaya mencapai kehidupan damai dimaksudkan sebagai indikasi tercapainya transformasi pengetahuan oleh TIM PAR terhadap sasaran penelitian (masyarakat yang sedang dalam kondisi rawan konflik).

Tingkat pengetahuan masyarakat dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

#### 1. Ternate

Secara kualitatif, nalar kognitif masyarakat mengartikulasikan kondisi lingkungannya terkait sebab-akibat konflik dimengerti secara cukup baik. Runut konteks kesejarahan desa, peta desa, permasalahan desa, hingga pengenalan tingkat kebutuhan desa mampu dijabarkan secara panjang lebar, serius dan penuh argumentatif oleh masyarakat setempat. Dengan itu, dampak atau akibat paska konflik sebenarnya telah disadari lebih awal, walaupun kemungkinan terjadinya konflik tetap saja dapat terjadi. Artinya, pemahaman masyarakat terhadap sebab-akibat konflik bukan menjadi satu-satunya cara efektif untuk meredam terjadinya konflik berkelanjutan pada masa mendatang. Masyarakat pada dasarnya cukup mengerti dengan akibat dari kondisi konflik yang akan dialami, namun belum mendapatkan ruang komunikasi publik bagi upaya damai di lingkungannya.

Hal ini dalam pengamatan peneliti adalah indikasi dari situasi stagnan dan belum terbuka bagi perubahan. Aktivitas kebudayaan dibidang kepercayaan, ekonomi, teknologi, kesenian dan organisasi sosial - sebelum TIM PAR datang— berjalan asimetris, tidak saling terbuka antar berbagai komunitas yang tinggal. Sehingga yang terbangun bukanlah solidaritas universal, tetapi komunal. Terbukti dengan mediasi penerapan PAR dengan fokus kegiatan kesenian dan olahraga dimana fasilitasi ruang publik dirancang dengan mekanisme terbuka dan berdasar komitmen kolektif, ikatan komunal secara alami mencair menjadi lebih merekatkan ikatan persaudaraan lintas etnis, agama dan kelompok. Artinya jika dahulu ruang kompetisi antar lintas agama, etnis dan kelompok adalah sesuatu yang dikhawatirkan, namun dengan mediasi dan fasilitasi melalui penerapan PAR, pergumulan lintas kalangan berangsur-angsur menjadi semakin bernilai rasional dan obyektif.

Secara kuantitas —setelah program penelitian PAR berlangsung—, kapasitas pengetahuan masyarakat dalam melihat sebab-akibat konflik, menganalisis masalahnya sendiri,



sampai kemudian menemukan alternatif upaya damai terbilang hampir merata di semua cakupan kalangan masyarakat. Walaupun tingkat keberagaman etnis cukup variatif, perimbangan komunitas agama sama-sama banyak, serta perbedaan lainnya cukup beragam (terutama di Desa Soakonora), namun bergulirnya sosialisasi damai untuk semua berjalan sangat komunikatif dan penuh keakraban. Dengan itu, kecenderungan pemahaman damai untuk semua yang akhirnya menjadi "jargon bersama" antara dua desa ini telah diterima secara baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Di mana dalam penilaian mereka sendiri upaya-upaya damai yang difasilitasi TIM PAR terlahir dari ajakan hati ke hati, bukan ceramah, seminar, penertiban dan semacamnya. Demikian ini tidak lepas dari keberhasilan para CO (*community organizer*) yang telah dilatih oleh TIM PAR dan dipercaya oleh masyarakat untuk menyampaikan keterampilan yang diperoleh kepada warga masyarakat desa lainnya.

Dari observasi dan analisis mendalam tidak ditemukan motif-motif emosional dalam berbagai aktivitas selama proses penerapan PRA berlangsung, tidak pula karena penilaian "benar atau salah" dalam penetapan-penetapan keputusan, perumusan rancangan kegiatan, evaluasi dan refleksi keberhasilan kegiatan. Artinya, hampir keseluruhan warga yang terlibat dan yang tidak terlibat secara langsung dalam proses PAR mampu menerima dan mau terlibat. Terbukti di setiap aktivitas kegiatan untuk upaya damai mampu dibicarakan dan didialogkan oleh warga sendiri secara terbuka dan argumentatif dalam forum bersama di masing-masing lingkup persoalan dan kewilayahan. (Catatan Untuk Ternate khususnya di Desa Acango dan Suakonora Jailolo Halmahera Barat: Dari FGD yang dipimpin oleh OC "Dari Masyarakat" mereka menginginkan program; turnamen sepak bola, lomba lari maraton 10 km, volley, pingpong, festival nyanyi dan tari, perbaikan masjid, gereja dan lembaga pendidikan. Tim diskusi dari peneliti Depsos dan LIPI serta Menko Kesra, dll, semula umumnya tidak setuju karena semua kegiatan olah raga itu sensitif dan potensial menyulut emosi yang bisa berwujud kerusuhan baru. Namun karena itu keinginan masyarakat

pada proses hingga final kegiatan ternyata sukses dan mencairkan kebekuan komunikasi lintas desa beda agama.)

## 2. Poso

Secara umum masyarakat tidak mengetahui penyebab utama kerusuhan yang mereka alami. Pandangan umum penduduk Tegalrejo dan Madale tentang sebab kerusuhan adalah adanya ketersinggungan penganut kepercayaan serta penguasaan lapangan pekerjaan oleh salah satu pihak.

Kapasitas pengetahuan masyarakat tentang konflik terbatas pada info atau isu yang beredar dari mulut ke mulut. Tidak ada versi tunggal tentang sebab musabab atau motif yang menjadi akar kerusuhan. Namun dalam kondisi demikian, masyarakat telah sampai pada titik nadir menolak terulangnya konflik.

Masyarakat menyadari bahwa konflik mungkin belum sepenuhnya selesai. Karenanya relasi masyarakat Tegalrejo dan Madale yang secara kontras berbeda agama (sebelum adanya PAR) *sangat dingin*, dan diselimuti oleh perasaan curiga dan was-was.

Hal tersebut dikarenakan belum adanya penyelesaian tuntas yang dilakukan oleh pemerintah tentang kerusuhan yang terjadi sebelumnya.

Masyarakat mengalami perasaan *distrust* terhadap pejabat lokal yang dalam beberapa kasus terbukti menyalahgunakan uang bantuan untuk korban. Diakui masyarakat bahwa konflik hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti para pejabat lokal. Ada sindiran yang umum diceritakan masyarakat bahwa: "masyarakat sebagai korban mendapatkan supermie, sedangkan pejabat atau pihak (yang katanya membantu) mendapatkan kijing super".

Menurut masyarakat, belum pernah ada kegiatan penelitian terlibat kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat seperti penelitian ini sebelumnya. Selama ini, upaya rekonsiliasi hanya berbentuk ceramah, dan kampanye damai tanpa aksi kongkrit penyatuan masyarakat. (Catatan Untuk Poso: Dari FGD yang dipimpin oleh OC "Dari Masyarakat"



mereka menginginkan program ; turnamen vol-ley ball, pingpong, festival nyanyi dan tari, perbaikan jembatan penghubung dua desa, pelatihan pembibitan dan penanaman jati super, pencangkakan pohon coklat hingga bisa berbobot buah 1 kg perbutir, dan pesta akhir tari dero antar warga Desa Tegalrejo dan Madale. Tim diskusi dari peneliti Depsos dan LIPI serta Menko Kesra, dll, sebagaimana untuk Ternate semula banyak yang tidak setuju karena semua kegiatan olah raga yang sensitif dan potensil membakar emosi massa yang dapat mengakibatkan kerusuhan lagi). Kenyataannya keraguan tadi tidak muncul lagi karena itu kemauan masyarakat dan ternyata berhasil mencairkan kebekuan komunikasi lintas desa Islam dan Kristiani sebagaimana di Ternate)

## B. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan PAR

Partisipasi dalam konteks penelitian ini dimaksudkan sebagai adanya proses aktif dari pihak masyarakat untuk berinisiatif sendiri melakukan kontrol efektif bagi upaya-upaya damai melalui berbagai kegiatan yang rancang sendiri oleh masyarakat. Berikut konteks partisipasi masyarakat di wilayah Poso dan Ternate.

### 1. Ternate

Dengan pendekatan PRA meniscayakan tindakan-tindakan partisipatif dari berbagai kalangan di setiap kegiatan. Ujud partisipasi yang digalang pada kegiatan need assesment, penyusunan kegiatan, pembuatan proposal kegiatan, penyusunan kepanitiaan, penetapan CO (*community organizer*) dan berbagai kegiatan lainnya didasarkan atas inisiatif bebas dari warga dan difasilitasi oleh tokoh agama, pimpinan adat, tokoh masyarakat, dan aparat desa setempat. Hingga akhirnya kepanitiaan menetapkan langkah strategi kerja dengan melakukan kontak kemitraan ke berbagai pihak seperti Gubernur, Bupati, Camat, atau kontak kelembagaan lainnya untuk mendapatkan sumbangan atau bantuan teknis lainnya. Dengan itu masyarakat mengembangkan pola pemanfaatan sumber daya secara mandiri tanpa kendali pihak luar.

Nuansa partisipasi mandiri (*self mobilization*) di tengah suasana paska konflik – pengakuan pelbagai kalangan—adalah khabar gembira bagi pembentukan iklim damai. Disadari oleh masyarakat, luka akibat konflik masih tersisa dan membekas dalam, namun disadari pula bentrok fisik bukanlah solusi efektif bagi pembangunan dan perubahan kehidupan sosial, keagamaan dan ekonomi masyarakat di desa acango dan soakonoro, terpenting bagi generasi mendatang.

Pengamatan peneliti, tingkat partisipasi baik secara kuantitatif dan kualitatif terbilang sangat baik. Indikasi keterwakilan dan terutama keterlibatan di setiap kegiatan oleh warga masyarakat terbukti mencakup dan meliputi semua kalangan, bahkan meluas hingga di luar komunitas masyarakat di dua desa. Di setiap kegiatan yang dirancang oleh “kepanitiaan dua desa” tidak saja telah berhasil melibatkan desa-desa di sekitarnya, namun telah pula berhasil mengikatkan hubungan sipil-militer yang sebelum ini kurang harmonis. Kegiatan yang sedianya ditargetkan oleh TIM PAR untuk dua desa, praktiknya berhasil mengajak turut serta aktif seluruh desa di Kec. Jailolo, bahkan hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, seperti Kec. Sahu, Ibu, Bubana Igo, Sidangoli, Tobelo, Galela hingga meluas ke kecamatan Ternate Kota. Tidak mengherankan jika kemudian pembukaan acara kegiatan diresmikan secara semarak oleh Wagub Maluku Utara, sekaligus memberikan sumbangan semen 500 zak dan seng 300 lembar untuk pembangunan tempat ibadah di desa Soakonora dan Acango. Partisipasi juga diikuti oleh Bupati Halmahera Barat dengan memberikan sumbangan berupa sejumlah 300 zak semen dan 300 dus keramik.

### 2. Poso

Masyarakat dengan antusias mengikuti setiap event kegiatan yang dilaksanakan oleh CO bersama masyarakat.

Masyarakat tidak menyangka bahwa kegiatan yang telah berlangsung sejak Juli adalah realisasi hasil pertemuan para peneliti dengan masyarakat. CO tidak pernah menyinggung bahwa kegiatan yang



berlangsung adalah follow up penelitian. Baru pada akhir program –monev- di mana para peneliti turun dan langsung berhadapan dengan masyarakat kembali, mereka sadar bahwa kegiatan yang berlangsung secara alamiah selama ini adalah bagian integral dari penelitian. Dan ini sangat disenangi masyarakat, karena kesan yang ada selama ini adalah bahwa penelitian hanya mencari dan mewawancarai masyarakat tanpa ketahuan hasilnya.

Dengan berbekal kemampuan pengorganisasian rakyat, CO memfasilitasi masyarakat beraudiensi dan meminta partisipasi para stakeholders yang ada di sekitar wilayah Poso Kota. Dinas Pertanian, melalui Sub Pelatihannya, memfasilitasi kegiatan pembudidayaan tanaman coklat; Pihak Kecamatan dan Kelurahan membantu tambahan trophy dan hadiah kepada para pemenang lomba; beberapa warga menyumbangkan makanan, kayu untuk stage, dan berbagai sarana lain yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan.

Aparat keamanan (TNI dan Polri) menyambut dengan sangat gembira adanya “pemecah batu” kebekuan hubungan sosial dan psikologis antar dua kelurahan. Dalam beberapa event, aparat keamanan secara langsung terlibat dan “menikmati” kegiatan yang secara spontan dan terencana dilaksanakan di dua kelurahan tersebut.

Pemilihan CO secara demokratis oleh masyarakat dan berasal dari masyarakat memudahkan proses pelaksanaan PAR dan membuat partisipasi masyarakat tanpa jarak dengan kegiatan yang ada. CO yang terlatih ini menjadi agen penelitian sekaligus menjadi cikal bakal kelompok fasilitator masyarakat dalam menangani dan memecahkan masalah mereka sendiri.

Kepala Kelurahan di Madale dan Tegalrejo menyambut baik inisiatif dari warga untuk menyusun berbagai kegiatan yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan keterbukaan antar dua komunitas yang berbeda. Dan ini adalah langkah pertama yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif.

Meski masyarakat terlibat secara aktif, namun menurut peneliti munculnya partisipasi tersebut pada awalnya bukan merupakan sesuatu yang secara spontan muncul begitu saja. Partisipasi masyarakat sesungguhnya lebih bersifat *fungsional*, lahir dari dorongan pihak Tim PAR dan sangat bergantung atas stimuli pihak luar yang terpercaya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat masih tingginya tingkat kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap pihak luar dan pihak selain dari kelompok mereka. Namun berangsur-angsur setelah memahami tujuan penelitian dan pentingnya peran aktif masyarakat yang selama ini diabaikan oleh pihak-pihak yang turun menyelesaikan konflik di lokasi penelitian, masyarakat secara perlahan mulai menunjukkan tingkat partisipasi mereka secara mandiri.

### C. Kajian Jaringan Hasil-hasil Penelitian PAR

#### 1. Ternate

- a. Upaya transformasi keterampilan menganalisis Idea tentang “damai untuk semua” telah diterima baik oleh masyarakat di desa Acango dan Soakonora, lebih luas untuk masyarakat Halmahera Barat. Idea damai untuk semua ini sebenarnya adalah terlahir dari keberhasilan secara mandiri dari oleh dan untuk masyarakat melalui upaya pemikiran melihat kilas balik kesejarahan, pengenalan kewilayahan, penumbuhan kesadaran kritis, penguatan akses sumberdaya, pengorganisasian serta mekanisme kontrol yang efektif dari komitmen yang terbangun secara kolektif.
- b. Kondisi kondusif untuk damai ini banyak dipengaruhi pula oleh pola mediasi yang mengarah pada kemandirian sukarela tanpa paksaan dan intimidasi dari pihak luar.
- c. Upaya damai yang ditonjolkan oleh masyarakat Jailolo Halmahera Barat terkonsentrasi pada orientasi untuk membuka “kran komunikasi publik” melalui kegiatan-kegiatan kesenian dan olahraga.

- d. Di bidang olahraga, masyarakat Acango dan Soakonora memiliki asset berupa "piala bergilir" yang menjadi salah satu simbol bagi ajang kompetisi olahraga antar desa dan kecamatan di kabupaten Halmahera Barat yang akan digelar secara rutin tahunan.
- e. Di bidang ritual keagamaan, telah terbangun satu masjid di desa Acango dan Soakonora, serta satu Gereja di Desa Soakonora. Berdirinya ketiga tempat ibadah ini di samping pendanaannya awalnya distimulasi oleh TIM PAR, namun mendapat sumbangsih pula dari Gubernur Maluku Utara, Bupati Halmahera Barat dan masyarakat disekitar kedua desa bersangkutan.

## 2. Poso

- a. Mulai tumbuhnya rasa saling percaya dan terciptanya komunikasi antar warga yang berbeda agama di dua kelurahan Tegalrejo dan Madale. Sebelum adanya kegiatan dan penelitian PAR, masyarakat di dua komunitas tersebut hampir-hampir tidak bertegur sapa, apalagi saling bercengkrama sesama karena dihantui rasa takut dan curiga.
- b. Munculnya kesadaran di masyarakat bahwa konflik yang terjadi selama ini hanya menyisakan kepedihan yang tiada berarti dalam kehidupan mereka. Konflik telah merenggut kebahagiaan dan kesejahteraan mereka dan mengancam eksistensi masa depan keturunan mereka. Karenanya dalam penyusunan rancangan program, keinginan mereka adalah untuk menyusun kegiatan yang dapat membangun kembali rasa persaudaraan di antara mereka dan dapat menunjang subsistensi kehidupan mereka dan keluarganya.
- c. Pertanian yang sebelum adanya kegiatan PAR ini belum begitu berjalan baik, mulai tampak mengalami kegairahan. Madale merupakan lokasi lahan ladang tidak

hanya oleh penduduknya, tapi juga oleh penduduk Tegalrejo. Sebelum adanya kegiatan PAR, masyarakat Tegalrejo yang memiliki lahan di Madale tidak begitu berani menginjak dan mengolah lahan mereka karena masih ada rasa takut. Namun sejak runtuhnya tembok psikologis antar mereka, lahan ladang yang tidak produktif mulai diaktifkan kembali.

- d. Masyarakat mulai berani melakukan aktifitas di malam hari di sepanjang jalan perbatasan dua desa. Di mana hal tersebut tidak terjadi sebelum adanya berbagai kegiatan yang berlangsung sejak bulan Juli sampai Oktober.

## IV. ANALISA TEORITIS ATAS TEMUAN PENELITIAN

### A. Ketepatan Hipotesis

#### 1. Kajian atas konsep-konsep terkait

Setelah mencermati data mulai dari masyarakat bertemu melakukan *need assesment*, kelahiran program, kemampuan membuat proposal, menyelenggarakan program serta memenej seluruh kegiatan serta membuat langkah-langkah antisipasi kemungkinan negatif yang akan terjadi, dan menanggulangi kekurangan dana dari berbagai sponsor yang diharapkan berpartisipasi, dan mereka merasa puas dengan prestasi kerja mereka, maka hipotesis yang berbunyi "Semakin menebal rasa masyarakat tentang program yang ditawarkan itu bersifat kemauan pihak pengembang untuk kedamaian (*top down*) , semakin menipis keyakinan dan perilaku keikutsertaan masyarakat untuk melakukan kedamaian lintas agama maupun lintas desa (*bottom up*). Dengan kata lain "Tingkat keterlibatan masyarakat di dalam mengelola dan menangani konflik yang terjadi berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian konflik secara damai dan berkesinambungan", dapat dipandang terbukti dalam penelitian ini.



## 2. Respon atas pembangunan para pihak

Atas dasar ketepatan hipotesa tadi, berarti pembangunan yang direspon dari ide-ide yang tumbuh dari warga masyarakat umum (*public*) yang diawali dari akomodasi, inventarisasi dan disistematisasi mulai dari desa, menuju kecamatan, kabupaten, propinsi hingga pemerintah pusat secara piramida terbalik, maka kecenderungan keberhasilan akan lebih tinggi dan cenderung dibarengi tanggungjawab tinggi serta kepuasan yang tinggi pula.

Pembangunan yang masih dimulai dengan arogansi keangkuhan akademis yang ditopang oleh kemahiran beretorika pembangunan lewat pendekatan untai logika epistemologi yang terangkai indah, dimana secara ontologis serta aksiologis akan berbenturan satu sama lain karena warga masyarakat hanya akan dipandang sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Jikapun masyarakat mau menerimanya hanya karena dipayungi oleh budaya masyarakat tersebut tidak biasa mempermalukan seseorang atau kelompok dikhalayak ramai atau karena masih takut menyatakan pendapat, penolakan atau dipandang mereka bahwa kehadiran pembangunan itu sebagai kesempatan dapat bahagian uang atau materi korupsi dan pemerasan para pejabat Negara atau sumbangan dari LSM yang juga menjadikan masyarakat sebagai objek mereka berkedudukan misi kemanusiaan untuk menanggung dana dari pelbagai funding dalam dan luar negeri. Dimana mereka hanya mendapat porsi kecil sekali dari sumbangan yang mereka bagi ke masyarakat yang dilanda masalah atau menderita konflik, kerusuhan atau bencana alam atau situasi perang. Dengan demikian masyarakat tidak akan pernah cepat bangun dari keterpurukannya. Pernyataan terakhir ini dapat juga dijadikan bahagian proposisi hipotesis untuk penelitian lebih lanjut di bidang program yang membelakangi pendekatan PAR yang berciri *community development* berakar dari *bottom up* (*grassroot*) programming serta *top down* (*government*) *facilitating*.

Pendekatan ini sering sudah didengungkan dalam berbagai penelitian dan seminarnya

akan tetapi sesungguhnya umumnya hanya slogan belaka, dalam prakteknya tetap saja *top down* dengan alasan disesuaikan dengan pola proyek yang dianut pemerintah yaitu harus selesai dalam empat hingga enam bulan keseluruhan. Sementara lapangan (*masyarakat*) masih menuntut waktu yang relatif panjang 1 tahun atau lebih. Atau menuntut kelanjutan di tempat yang sama atau perluasan ke tempat lain namun cenderung dipandang selesai dan tidak urgen karena akan dialihkan ke topik lain. Berarti pendekatannya lebih bersifat kekayaan variasi atau pemerataan penelitian bukan menindaklanjuti temuan yang sudah baik. Dengan demikian laporannya akan sering tersusun indah, rapi bahkan masuk akal akan tetapi penuh kebohongan publik dan kepalsuan kebenaran akademis, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Kalaupun diacu juga, keputusannya sangat sia-sia sekaligus penghamburan dana ditengah-tengah kemiskinan masyarakat yang membutuhkan pembangunan mereka dengan pendekatan metode *Participatory Action Research*.

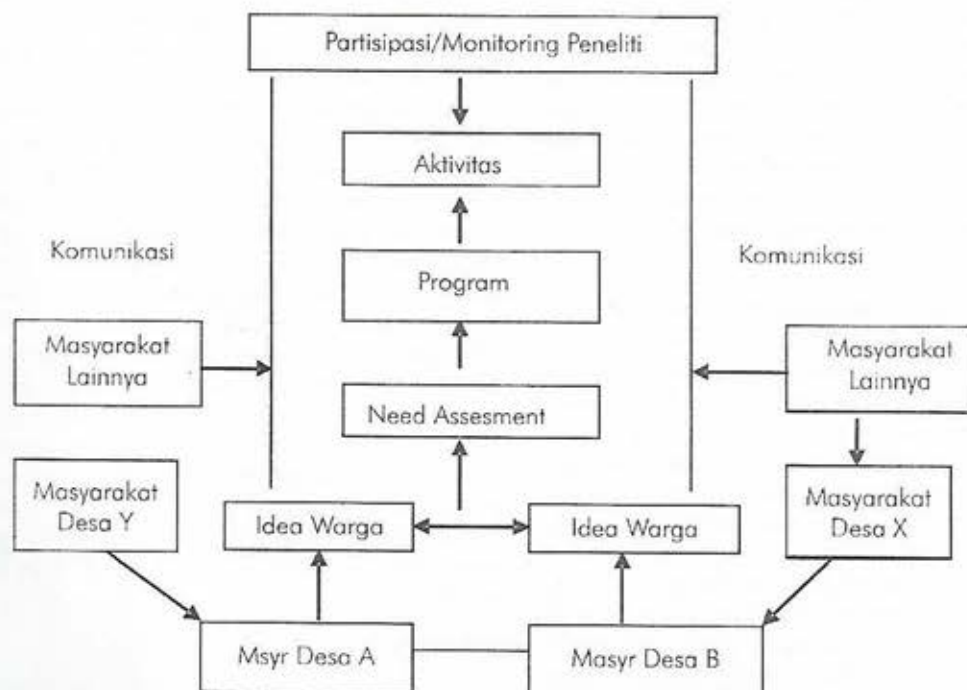
## B. Temuan Teoritis

Di atas telah dinyatakan model teoritis yaitu *"Semakin mengakar program dari ide, aktivitas sosial dan perilaku bersama masyarakat dalam membangun atau melakukan perubahan dan direspon secara partisipatif oleh peneliti, akan semakin mempercepat kemajuan dalam pelbagai komponen kehidupan hingga penguatan serta penambahan komponen pranata atau kelembagaan dalam masyarakat yang bersangkutan"* atau *"Community Sharing Ideas Theory"* yang diwujudkan dengan kerangka konseptual sebagaimana terlihat pada bab pendahuluan.

Dengan memperhatikan dimana warga masyarakat baik di wilayah penelitian Poso maupun Halmahera Barat, berhasil mewujudkan aktivitas bersama memperbaiki atau membangun Rumah Ibadah Mesjid, Mushalla dan Gereja, pertandingan (turnamen) olah raga bola kaki, volley, pingpong, lomba kesenian seni tari dan suara (*Poco-poco*, *Dangdut*) hingga kesenian perpisahan seperti Tari Dero (*Tradisional*) untuk keakraban, diantara antar warga desa yang beda agama,

etnis serta lintas desa, maka model teoritis itu berlaku di wilayah penelitian dengan skema yang sedikit berbeda sebagai berikut:

"Speculative Theory" yang proposisi saja atau lengkap dengan model teoritisnya);



Legenda: Model teoritis ini dianalisa dari temuan lapangan 2004 dibandingkan dengan kerangka konseptual semula yang didisain dari pemikiran serta temuan para ahli dalam konsep-konsep, proposisi dan model teoritis para ahli tersebut.

Karena PAR ini dilakukan dalam rangka menemukan program perdamaian baik yang bersifat pencairan maupun penguatan interaksi hingga rasa aman dan akrab, maka proposisi teoritisnya menjadi berbunyi: Semakin mengakar program dari ide, aktivitas sosial dan perilaku bersama masyarakat yang pernah terlibat konflik dan kerusuhan akan semakin mempercepat kedamaian tercipta di antara sesama dan lintas warga hingga keikutsertaan warga desa tetangga (*cluster rural*) yang tidak masuk program penelitian PAR. Dengan nama "Teori Rembuk Pengetahuan Lintas Masyarakat" atau "The Cross Communities Sharing Ideas Theory".

#### C. Analisis Tentang Komponen Penting Dalam Pelaksanaan PAR

1. Memantapkan temuan-temuan ahli terkait sebelumnya ("Empirical Theory" dan atau

2. Mempedomani tulisan-tulisan yang berisi argumen-argumen logis yang relevan (Proposisi Paradigma dan atau Konsep-Konsep)
3. Mengorganisir masyarakat melalui jalur birokrasi, kekuatan organisasi sosial dan tokoh kharismatik hingga person yang kompeten dan representatif dalam masyarakat;
4. Menunjukkan kepribadian yang simpatik untuk semua orang;
5. Menunjukkan kelincahan, keseriusan, tak kenal lelah, dan all round (hampir terpakai untuk apa saja).
6. Menampilkan identitas agama diri dengan baik dan menghargai agama orang lain;
7. Mencatat, merekam, memfoto sebaik mungkin segala proses rapat, diskusi, pembuatan program, kegiatan



- pelaksanaan program; kasus-kasus yang terjadi; pertemuan babak akhir program;
8. Saat berlangsung diskusi antar warga, peneliti lebih banyak diam simpatik, sekali-sekali bertanya tentang sesuatu dari pendapat mereka yang belum jelas, jika kita duduk di samping komunitas tersebut. Jika mereka bingung kita dapat mencoba menawarkan sejumlah alternatif untuk dipertimbangkan;
  9. Jika ada masalah yang harus dipecahkan oleh TIM Peneliti, sebaiknya dibelakang warga setting penelitian dan kalau harus di sekitar mereka itu juga tunjukkan diskusi dengan rawutan wahaj atau air muka yang tenang, bersahabat dan hangat;
  10. Data pokok dan pendukung berupa dokumen, photo, peta, buku, materi situs, world view dikumpul dengan cepat dengan perinsip jangan tunggu sampai esok apa yang dapat dikerjakan hari ini seolah-olah hari esok kita tak akan disitu lagi;
  11. Usahakan secepatnya memahami budaya bahasa setempat, khususnya: Salam dan caranya, ucapan ketika berpisah, pernyataan ucapan terima kasih, dan ucapan penolakan secara sopan; bentuk perilaku komunikasi yang berterima dengan baik;
  12. Anggaplah mereka sebagai orang tua, kakak, adek, dan saudara kandung kita yang sedang memprihatinkan dan perlu dibantu;
  13. Harus cerdik dan cepat mengamati orang-orang yang mencurigakan, orang-orang yang merupakan person atau kelompok penekan "pressure person atau pressure group" dan saling dikomunikasikan sesama tim peneliti untuk diantisipasi dengan pihak terkait;
  14. Jangan terlalu optimis dan jangan terlalu pesimis. Berbuat, do'a dengan tawakkal;
  15. Prinsipkan kita hanya salahsatu mata rantai dari kehidupan masyarakat tersebut dari itu titipkan amanah yang serius dan simpatik lewat bujukan kepada CO dan lainnya.
  16. Lukiskan teori yang riil dilapangan "Empirical Theory" dan kajilah (kritis dan tafsirkan) dengan teori yang telah pernah

ada (pada nomor 1 dan 2 di atas) "Empirical theory" dan atau "Speculative Theory".

#### D. Perspektif PAR untuk Kedamaian di Setting Penelitian

Dengan memperhatikan keberhasilan pelaksanaan PAR di wilayah penelitian, dengan pernyataan mereka puas dan belum pernah ada program yang dibinakan cara awal dan akhir program kecuali yang mereka alami tersebut, maka diyakini kedamaian di desa-desa yang di bina lewat pendekatan PAR ini, akan terus mantap. Sekalipun masih adanya provokator-provokator yang memancing konflik dan kerusuhan warga masyarakat ini tidak akan mudah terpengaruh lagi.

Di sisi lain, nampaknya keberhasilan ini, dapat dijadikan dasar bagi penelitian pembangunan dan perubahan masyarakat ke arah kedamaian yang lebih mantap di wilayah konflik dan rusuh lainnya dengan pendekatan PAR. Dengan catatan prosedur PAR itu dilakukan sesuai dengan acuan dasar dengan memperhatikan distinksi budaya, agama, ekosistem dan kebutuhan ril dan yang dirasakan komunitasnya.

Dapat pula diprediksi kegagalan penelitian yang menyatakan pendekatan PAR hanyalah karena dalam pelaksanaannya tidak diikuti sepenuh hati akan tetapi meminjam konsep dipermukaan atau pada tingkat retorika seminarium saja.

Dapat pula diprediksi, penelitian sosial yang diawali dengan penelitian penggalan data dan dianalisa secara kuantitatif maupun kualitatif serta dikaitkan dengan penguatan pengguguran atau pengoreksian teoritis tertentu yang relevan, kemudian tidak diikuti dengan pembangunan lewat penelitian dengan pendekatan PAR, maka peneliti dan pengambil keputusan inilah yang telah dan akan terus menerus menghaburkan dana sekedar memperkaya hasanah keilmiahan di dunia akademis, akan tetapi sangat sia-sia bagi ruh pembangunan bangsa khususnya masyarakat miskin didesa kota maupun di wilayah komunitas adat tertinggal.

Lewat temuan penelitian ini dapat diproposisikan bahwa paradigma penelitian yang bernuansa pembangunan sebagai "bantuan stimulan" sudah saatnya dirubah pandangannya menjadi "dana penelitian pembangunan program masyarakat" dengan asas kompromis masyarakat dengan peneliti secara transparan, bukan harga mati (*top down*) dari peneliti suatu Departemen atau dan Lembaga pelaksananya. Dengan demikian peneliti ini optimis isapan jempol yang selama ini masih melilit penelitian kita sehingga diplesetkan orang konsep sinonim Litbang itu menjadi "Sulit berkembang", citranya akan terangkat secara berangsur-angsur dalam waktu yang tidak terlalu lama. Di sisi lain, pekerja-pekerja di lingkungan akademis atau manajemen penelitian yang tidak punya kompetensi atau tidak mau belajar pesat secara otodidak di bidang penelitian, akan merumuskan percepatan pencapaian kualitas dan kuantitas penelitian yang tepat sasaran. Pahala dan dosa besar *desicion maker* pembangunan banyak terletak pada akademisi dan birakrat penelitian. Prinsip idealisme jembatan kesuksesan Pendekatan PAR.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan PAR (*Participatory Action Research*) di wilayah konflik umumnya dapat diterima dengan sangat baik, karena dinilai cukup berhasil mengembalikan kemandirian warga (inisiatif bebas) untuk mengubah dan mengendalikan sistem dan nilai yang mereka miliki sendiri. Sehingga masyarakat mampu mengembangkan kepercayaan diri mereka untuk melakukan kontak komunikasi dan kerjasama dengan lembaga, komunitas dan pihak di luar mereka. Termasuk menjadikan masyarakat sebagai kendali atas pemanfaatan sumber daya dan akses kesejahteraan hidup melalui kesadaran kritis dan mekanisme kontrol yang obyektif dan adil. Prinsip utama dari keberhasilan penerapan PAR dalam penelitian ini adalah keterwakilan dan keterlibatan (partisipasi), transformasi keterampilan untuk mengidentifikasi dan menganalisis
2. Masalah masyarakat sendiri serta keterpercayaan pihak luar yang terlibat bersama masyarakat dalam upaya damai.

Mekanisme pelaksanaan PAR sejak awal hingga akhir dapat berhasil karena diiringi dengan kesungguhan, percepatan penguasaan kaedah dan rukun PAR, penginventarisasian warga dan pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan need assessment, program, pembuatan proposal, pembinaan community organizer, pelaksanaan, mengatasi kasus-kasus yang muncul, menjadi advokasi atau pendamping dalam diskusi menemukan tenaga ekspert/instruktur atau penyuluh yang diperlukan untuk bidang tertentu, hingga pelaksanaan administrasi keuangan dengan peserta, CO, instruktur, peneliti sendiri, dinas sosial dan pmda setempat, pemberian kesan baik dari peneliti, refleksi peserta hingga evaluasi akhir program. Dimensi lainnya peserta diusahakan mewakili lintas 'RT, RW dan Desa, Agama, Etnis hingga profesi. Dalam rangka itu peneliti disamping menjelaskan identitasnya, menunjukkan sikap dirinya bahagian dari warga masyarakat itu serta menjaga etika dan adapt-istiadat setempat.

Konteks masa deeskalasi konflik pada wilayah penelitian ini menuntut upaya-upaya penanganan secara kongkrit dari pihak pemerintah demi keberlangsungan hidup dan masa depan mereka, terutama untuk Poso. Untuk di Ternate, penciptaan iklim damai melalui penguatan akses sumber daya dan penciptaan ruang komunikasi publik yang berkelanjutan merupakan media efektif mengembalikan masyarakat dalam kondisi normal untuk membangun desa dan komunitasnya. Karena itu, menurut masyarakat, upaya penanganan konflik yang selama ini cenderung menyelesaikan pada tingkat permukaan tanpa keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kebutuhannya, sepatutnya ditinggalkan.



PAR di wilayah rawan konflik ini dilaksanakan dalam masa deeskalasi konflik. Pada masa ini, kondisi psikologis masyarakat rentan dalam suasana konflik kembali. Dengan itu pendekatan penanganan konflik terkait erat dengan keseriusan berbagai pihak untuk tidak menyulut kembali kondisi psikologis masyarakat yang sedang berangsur-angsur membangun kepercayaan diri untuk damai. Keterlibatan pihak luar dalam menangani konflik sepatutnya adalah dari pihak yang terpercaya, memiliki pendekatan yang komunikatif dan apresiatif, serta mengarah pada penguatan kebutuhan masyarakat sendiri tanpa tekanan dan dominasi pihak luar. Sejauh pengamatan peneliti, model penanganan konflik dengan prinsip yang diuraikan tersebut, merupakan model penanganan konflik ideal yang diharapkan masyarakat.

3. Program penanganan konflik yang telah dilakukan berdasar keinginan masyarakat dan terbukti membawa implikasi positif bagi upaya damai adalah melalui kegiatan kesenian dan olahraga. Kekhawatiran pemerintah, dan pihak lain bahkan sejumlah peneliti terhadap model penanganan konflik yang melibatkan masyarakat secara massal bukan menjadi penghalang bagi terjalannya ruang komunikasi yang akrab dan integratif. Akhirnya penelitian ini menemukan model teoritis "Penelitian dengan bimbingan pengenalan kebutuhan masing-masing desa dan bersama serta bantuan peneliti sekapasitasnya bagi perwujudan program warganya bersama-sama akan mewujudkan kedamaian lintas masyarakat atau "Teori Rembuk Pengetahuan Lintas Masyarakat" atau "*The Cross Communities Sharing Ideas Theory*". Teori ini kunci keberhasilan yang pembuktian keluasannya memerlukan penerapannya di lokasi lain yang permasalahan dasarnya relative homogen.

#### B. Rekomendasi

1. Hendaknya menggunakan PAR sebagai pendekatan di setiap penelitian aksi dan terapan (ujicoba), khususnya penanganan

masalah-masalah krusial dibidang sosial-kemasyarakatan. Yakni dengan tidak kaku menetapkan rancangan kegiatan-kegiatan sebelum mengkomunikasikan dan melibatkan masyarakat secara aktif.

2. Melakukan penelitian terapan (uji coba) yang serupa di daerah-daerah rawan konflik lainnya seperti Aceh, Papua, Ambon, Sambas, Sampit, dan lain sebagainya dengan menggunakan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*).
3. Khusus untuk manajemen anggaran dengan pendekatan PAR yang sekaligus penelitian berimplikasi pembangunan, supaya dibedakan dengan penelitian konvensional yakni murni pengumpulan data serta kajian teoritis saja yang menjadi kecambah bagi rekomendasi penelitian PAR sebagai tindak lanjut pembangunannya. Karena dalam penelitian PAR jika salah tangani dalam proses penelitian bisa mewujudkan kerusuhan baru dan sangat fatal bagi masyarakat serta penelitiannya.
4. Karena esensi fungsi Depsos adalah menangani masalah sosial yang distinksiya tinggi, seperti: Warga yang jompo, narkoba, anak jalanan, korban kerusuhan, bencana alam, komunitas adat tertinggal, tawuran lintas desa, dll, dimana membutuhkan penelitian dengan pendekatan PAR, sementara peneliti PAR dari Balatbangsos Depsos RI masih sedikit, termasuk dengan pendekatan antropologi yang dekat dengan program penelitian PAR tersebut, sebaiknya para peneliti Balatbangsos Depsos tersebut dibekali dengan pelatihan yang serius model pendekatan PAR tersebut. Sehingga diharapkan peneliti Balatbangsos Depsos RI semakin kaya dalam bidang pendekatan sehingga semakin berhasilguna bagi sasaran-sasaran penting bagi program pembangunan masyarakat dibawah kapasitas Depsos RI.
5. Sejalan dengan nomor empat ini, sesungguhnya juga peneliti rekomendasi kepada Perguruan Tinggi, Litbang Depag RI, serta Instansi atau lembaga

Pemerintahan atau Non Pemerintahan lainnya yang menjalankan fungsi pembangunan dari hasil penelitian konvensional, agar membekali penelitiannya dengan pendekatan PAR, di samping pendekatan inovatif lainnya dalam rangka memperkaya jumlah peneliti yang kompeten dalam berbagai pendekatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi Jayaputra dan Setyo Sumarno. *Permasalahan Sosial Korban Kerusuhan Di Propinsi Sulawesi Tenggara*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Tahun 2000.
- Anwar, Dewi Fortuna, Cs (Ed.) *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan sejarah, ekonomi politik, dan kebijakan di Asia Pasifik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005
- Atho Mudzhar, Mohamad et.al., *Identity, Religion, Ethnicity, Democracy, and Citizenship in Indonesia*, Jakarta: A Joint Research McGill University Montreal, Canada; The State Islamic University, Jakarta; The Office of Research and Development and Training Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia, 2004.
- Azra, Azyumardi (Ed.) *Agama Dalam Keragaman Etnik Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 1998.
- Bennis, Warner G. et al. (ed). *The Planning of Change*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1969.
- Chambers, Robert. *Rural Development: Putting the Last First*. London: Published by Longman Inc, 1983.
- Coser, Lewis A. and Rosenberg, Bernard. *Sociological Theory (Fourth Edition)*. USA: Macmillan Publishing Co., Inc. 1976
- Chambers, Robert. *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman Inc. 1983.
- Dahrendorf, Ralf. *Konflik Dan Konflik Dalam Masyarakat Industri (Sebuah Analisa Kritik)*. Terjemahan Ali Mandan dari judul aslinya: *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1986.
- Depsos RI. *Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Terbitan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Depsos RI. 1995.
- Djohan, Rianingsih. *Berbuat Bersama Berperan Setara: Acuan Penerapan Participatory Action Research*. Bandung: Driyamedia, 1996.
- Mikkelsen, Britha. *Motode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan (Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan)*. Terjemahan Matheos Nalle. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Moekijat. *Metode Riset Dalam Pelatihan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1994.
- Mitchell, J. Clyde. *Social Networks in Urban Situations (Analyses of Personal Relationships in Central African Towns)*. New York: Published for the Insitute for Social Research University of Zambia by Manchester University Press, 1969.



- Scarpitti, Frank R. *Social Problems* (Third Edition). New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1980.
- Spindler, Louise S. *Culture Change and Modernization : Mini Models and Case Studies*. Illinois: Waveland Press, Inc. 1977.
- Suparan, Parsudi, *Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan*, Jakarta: Jurnal Antropologi Indonesia Th. XXIII, No. 58 , 1999.
- Sukanto. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali. 1986
- Tubbs, Stewart L. dan Sylvia Moss. *Interpersonal Communication*. New York: Published in The United States by Random House Inc., 1978.
- Tumanggor, Rusmin. *Sentuhan Sistem Community Development Industri Berskala Besar Terhadap Perubahan Masyarakat Sekitar (Suatu Analisa Strategi Implementasi Kebijakan)*. Banda Aceh: Pusat Pengembangan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syiah kuala. 1987.
- , Cs (Ed). *Konflik dan Modal Kedamaian Sosial*, Jakarta: Terbitan Balatbangsos Depsos RI dan Lemlit UIN). 2004
- White, Alastair. *Community Participation In Water And Sanitation: Cocepts, Strategies and Methods*. The Netherlands: (Technical Paper) J.C. van Markenlaan 5, Rijswijk, 1981.

#### BIODATA PENULIS:

Rusmin Tumanggor, Guru Besar Antropologi Kesehata pada Universitas Islam Negeri Jakarta. Anggota Tim Pakar pada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Anggota Panitia Pembina Ilmiah pada Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Deprtemen Sosial RI.